

MENJAWAB PEMBENTUKAN AUKUS DI KAWASAN ASIA PASIFIK MENGGUNAKAN PRINSIP BEBAS AKTIF INDONESIA

Andrea Abdul Rahman Azzqy¹, Syahrul Awal²

¹²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur

¹andrea.abdulrachman@budiluhur.ac.id, ²syahrul.awal@budiluhur.ac.id

Abstrak

Pembentukan aliansi AUKUS oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada September 2021 menjadi perhatian Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Indonesia, sebagai pemain kunci, merespons AUKUS dengan prinsip "Bebas Aktif" dalam politik luar negerinya. Prinsip ini memungkinkan Indonesia menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa ekspresi dukungan atau penentangan tegas. Indonesia terus memantau AUKUS dan mengadopsi strategi hedging untuk mengurangi risiko. Upaya ini melibatkan peningkatan kemampuan militer dan kerja sama regional. Sikap Indonesia mencakup upaya menjaga stabilitas, berperan sebagai mediator, dan berpartisipasi dalam forum internasional demi perdamaian dan kerja sama. Pendekatan berlandaskan "Bebas Aktif" membantu Indonesia menjaga hubungan positif dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok, sambil tetap menjalankan peran aktif dalam stabilitas dan keamanan Asia Pasifik.

Kata kunci: AUKUS, politik luar negeri bebas aktif, hedging, stabilitas dan keamanan, kawasan asia pasifik.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 September 2021, Amerika Serikat bersama sekutunya, yaitu Australia dan Inggris, membentuk pakta pertahanan trilateral yang dikenal sebagai *Australia, United Kingdom, United States* (AUKUS). Pakta pertahanan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama militer, memperkuat ikatan trilateral, dan memberikan kapal selam nuklir kepada Australia. AUKUS memiliki prioritas dalam memperkuat dan modernisasi pertahanan kolektif ketiga negara ini dengan mengembangkan dan memanfaatkan kecerdasan buatan bertenaga nuklir. Di balik tujuannya untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik, AUKUS juga menjadi respon terhadap peningkatan anggaran belanja kapal selam nuklir oleh Angkatan Laut Tiongkok dan perubahan dinamika hubungan Tiongkok dengan banyak negara. Ada dugaan kuat bahwa AUKUS dibentuk sebagai upaya Amerika untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok, terutama setelah Tiongkok menjadi negara dengan anggaran militer terbesar kedua setelah Amerika (Diago Lopez Van Silva et al., 2022). Dukungan untuk

AUKUS oleh Australia, terutama dalam akuisisi kapal selam bertenaga nuklir, yang sebelumnya banyak dimiliki oleh Tiongkok, semakin memperkuat argumen ini (Barkat Ullah, 2021).

Peningkatan pesat kemampuan militer Australia dan Tiongkok berpotensi memicu dilema keamanan dan perlombaan senjata yang dapat mengganggu stabilitas di Kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini sangat strategis secara geopolitik karena merupakan tempat tinggal bagi separuh populasi dunia. Oleh karena itu, stabilitas di Kawasan Asia Pasifik sangat penting dan menjadi perhatian banyak negara. Untuk mencapai status sebagai kekuatan utama di Asia Pasifik, Amerika Serikat harus berhasil di Asia Tenggara, yang merupakan wilayah kunci dalam kawasan ini. Namun, dalam melaksanakan strateginya, Amerika Serikat akan menghadapi Tiongkok yang secara geografis dekat dengan ASEAN dan mitra dagang serta ekonomi yang sulit digantikan (Saskia Utami, 2022). Kemunculan pesaing bagi negara hegemoni seperti Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman, itulah sebabnya Amerika melakukan upaya *containment* terhadap Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik. Situasi semacam ini berpotensi memengaruhi stabilitas di Kawasan Asia Pasifik dan menempatkan Asia Tenggara dalam posisi yang sulit.

Peristiwa ini tentu akan berdampak pada Indonesia, sebuah negara dengan letak geografis yang dekat dengan potensi konflik antara AUKUS dan Tiongkok. Indonesia merupakan bagian dari Kawasan Asia Pasifik dan anggota ASEAN. Letak geografis Indonesia membuatnya menjadi perhentian penting bagi lalu lintas ekonomi Timur dan Barat yang melewati perairan Indonesia yang juga menjadi titik pertemuan Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Benua Australia, dan Asia. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi pemain kunci dalam lalu lintas maritim global. Australia, sebagai tetangga Indonesia, memiliki rencana untuk mengembangkan kapal selam nuklir dan peralatan militer lainnya di bawah kesepakatan AUKUS, yang berpotensi melibatkan perairan ASEAN yang berbatasan dengan Indonesia (Annisa dan Rifqy, 2022). Ini dapat melanggar Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), yang dapat membahayakan ASEAN, khususnya Indonesia. Tanggapan Indonesia terhadap AUKUS juga dapat berkontribusi pada

stabilitas dan perdamaian di kawasan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia akan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian. Konsep "Bebas Aktif" menjadi pedoman dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang berarti bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan kebijakan tanpa keterikatan pada kekuatan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Menjawab Pembentukan Aukus Di Kawasan Asia Pasifik Menggunakan Prinsip Bebas Aktif Indonesia."

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan regional, khususnya terkait dengan pembentukan AUKUS. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran rinci dan keunikan situasi di lapangan serta memungkinkan untuk mendalami perspektif individu, kelompok, dan organisasi yang terlibat (Krisyantono, 2014).

Proses penelitian ini melibatkan empat tahap utama:

1. Penelitian Kepustakaan: Tahap awal melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, termasuk publikasi resmi yang terkait dengan isu-isu diplomasi dan keamanan regional. Data dari literatur digunakan sebagai dasar pemahaman awal terhadap konteks masalah.
2. Studi Dokumen: Melalui kunjungan ke perpustakaan dan juga memanfaatkan sumber online, penelitian ini mendalam untuk menyelidiki dokumen, laporan, dan publikasi yang berkaitan dengan diplomasi Indonesia dalam menghadapi AUKUS. Data dari laporan resmi pemerintah, seperti yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri dan DPR RI, juga menjadi sumber penting dalam penelitian ini.
3. Analisis Data Eksisting: Data statistik yang relevan dan konsisten dengan studi ini dianalisis dan dikelompokkan untuk membentuk serangkaian informasi yang memadai. Data ini digunakan sebagai landasan penelitian untuk memahami perkembangan situasi terkini.

4. Analisis Kritis: Tahap terakhir melibatkan analisis mendalam dengan membandingkan data yang terkumpul dengan dasar konseptual yang digunakan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta untuk menarik kesimpulan yang tepat dan logis.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Indonesia memandang pembentukan AUKUS, implikasi potensialnya, dan peran prinsip "Bebas Aktif" dalam membentuk respons Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mencakup upaya Indonesia dalam memanfaatkan strategi lindung nilai dan kerja sama regional dalam menghadapi AUKUS dan strategi hedging terhadap Tiongkok serta negara-negara di sekitar wilayah ASEAN. Semua ini dilakukan dalam konteks menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Pasifik.

PEMBAHASAN

Prinsip "Bebas Aktif" Indonesia sebagai Landasan Kebijakan Luar Negeri

Indonesia selalu mengadopsi prinsip "Bebas Aktif" sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Prinsip ini berasal dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. "Bebas Aktif" mengandung arti bahwa Indonesia bebas dari penjajahan dan aktif dalam upaya menghilangkan penjajahan dari dunia (Anita Wijayanti, 2022). Prinsip ini telah membantu Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya di tengah tantangan geopolitik yang beragam. Kebijakan luar negeri Indonesia, yang didasarkan pada prinsip "Bebas Aktif," telah beradaptasi dengan perubahan dalam situasi internasional. Di era kepemimpinan Jokowi, terutama dari tahun 2021 hingga 2023, kebijakan luar negeri Indonesia menekankan pentingnya kerja sama keamanan regional. Munculnya AUKUS menandakan peningkatan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang telah menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia selama periode tersebut. Pemerintahan Jokowi memahami pentingnya stabilitas dan keamanan regional bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan menjaga hubungan dengan negara-negara Asia dan Pasifik. Dalam rangka menjaga hubungan ini, Indonesia terlibat dalam upaya kolektif yang mendukung kerja sama

antar negara di kawasan. Indonesia juga memanfaatkan ARF (Forum Regional Asia), yang merupakan forum keamanan regional yang mengumpulkan 27 negara untuk membahas masalah keamanan, termasuk nonproliferasi senjata nuklir dan perlucutan senjata. Dalam konteks ini, Indonesia berperan aktif dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di Kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga memiliki peran penting dalam mempromosikan penggunaan senjata secara bertanggung jawab dan mencegah penyebaran senjata nuklir melalui keterlibatannya dalam Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT).

Komitmen Indonesia terhadap NPT adalah hasil dari prinsip "Bebas Aktif" dan sejalan dengan Gerakan Non-Blok (GNB). Indonesia, sebagai negara non-blok, menganggap NPT sebagai alat untuk mempromosikan perlucutan senjata dan mencegah penyebaran senjata nuklir tanpa mendukung salah satu pihak. Komitmen ini berakar pada tujuan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih luas, yaitu mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan serta mengupayakan kerja sama dan dialog dengan negara-negara lain. Dalam menjalankan prinsip "Bebas Aktif" dalam politik luar negerinya, Indonesia tidak berarti bersikap "netral" atau mengabaikan perkembangan dalam urusan internasional. Sebaliknya, Indonesia berusaha untuk beradaptasi dengan situasi internasional yang terus berubah. Munculnya AUKUS pada tahun 2021 diinterpretasikan sebagai peningkatan komitmen strategis Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebangkitan Tiongkok, khususnya di Kawasan Asia Pasifik. Langkah strategis ini menunjukkan perubahan besar dalam kebijakan aliansi Amerika di Asia dan memengaruhi negara-negara di kawasan tersebut. Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan hubungannya dengan berbagai kekuatan internasional tanpa membahayakan stabilitas regional (Nindya Annisa & Abbiya Rifqy, 2022). Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas Kawasan Asia Tenggara.

AUKUS Sebagai *Balance Of Power* Terhadap Tiongkok Di Kawasan Asia Pasifik

Pembentukan AUKUS sebagai Balance of Power Amerika dan Sekutu di Kawasan Asia Pasifik pada tanggal 13 Maret 2023 adalah langkah yang signifikan dalam modernisasi aliansi dan kemitraan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemitraan ini didasarkan pada komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan stabilitas global, meningkatkan kerja sama diplomatik, keamanan, dan pertahanan di kawasan Asia Pasifik, serta melindungi industri dan jaringan penting di seluruh kawasan ini. Pentingnya kerja sama dalam bidang pertahanan menjadi jelas ketika personel militer dan sipil Australia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan industri kapal selam Amerika Serikat serta Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk mempercepat pelatihan personel Australia. Upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat dari ketiga negara untuk menguatkan kekuatan pertahanan mereka.

Langkah ini juga mengandung pesan tersirat bahwa Amerika Serikat ingin menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik, terutama menghadapi meningkatnya kekuatan Tiongkok. Australia, sebagai sekutu Amerika Serikat dan berada di kawasan yang sama dengan Tiongkok, merupakan elemen penting dalam strategi ini. Inggris juga memiliki peran strategis dalam perjanjian ini, termasuk hak pangkalan yang lebih permanen di Australia untuk kapal selam bertenaga nuklir mereka. Pembentukan AUKUS juga terkait dengan kekhawatiran akan kebangkitan Tiongkok dan dampaknya terhadap pengaruh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan. Ini mencerminkan dilema keamanan yang dihadapi oleh Amerika Serikat sebagai negara hegemoni yang menghadapi kebangkitan Tiongkok. Pakta AUKUS mencerminkan intensi untuk melawan langkah agresif Tiongkok di kawasan ini. Reaksi terhadap AUKUS di kawasan Asia Pasifik, terutama di kalangan negara-negara ASEAN, sangat beragam. Sebagian melihatnya sebagai tantangan terhadap sentralitas ASEAN, sementara yang lain mendukungnya sebagai langkah yang dapat meningkatkan keamanan kawasan. Ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam geopolitik Asia Pasifik.

Tiongkok, sebagai kekuatan besar yang menjadi fokus AUKUS, merespons dengan keprihatinan dan tentangan. Tiongkok menganggap AUKUS dapat memicu perlombaan senjata dan merusak stabilitas kawasan. Namun, ada juga negara-negara di kawasan yang mendukung AUKUS atau merasa perlu beradaptasi terhadapnya untuk menjaga keamanan mereka. Dalam konteks ini, perlombaan senjata dan proliferasi nuklir menjadi isu penting. Upaya Tiongkok untuk memodernisasi senjata nuklirnya sebagai respons terhadap peningkatan kapasitas pertahanan Amerika dan sekutu-sekutunya menciptakan ketegangan tambahan dalam kawasan Asia Pasifik. Situasi ini menggambarkan betapa kompleksnya dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik, dan bagaimana kebijakan dan perjanjian seperti AUKUS dapat memiliki dampak yang signifikan dalam merespons tantangan-tantangan ini.

Menilai Sikap Indonesia Dalam Menanggapi Pembentukan AUKUS

Pembentukan AUKUS oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada September 2021 menimbulkan tantangan bagi Indonesia. Indonesia perlu untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan kedua kubu yang terlibat, serta meningkatkan kemampuan militernya dan melakukan kerja sama regional untuk meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antar negara di kawasan. Pada awalnya, Indonesia memberikan sikap yang cukup hati-hati terhadap pembentukan AUKUS. Indonesia menyampaikan keprihatinan atas potensi peningkatan ketegangan di kawasan, serta mengingatkan pentingnya komitmen Australia untuk memenuhi kewajiban nonproliferasi nuklirnya. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia mulai memberikan sikap yang lebih tegas. Indonesia mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, serta menekankan bahwa Indonesia akan terus memantau perkembangan AUKUS.

Taktik Hedging. Sikap Indonesia yang hati-hati di awal, kemudian tegas di kemudian hari, dapat dijelaskan melalui teori hedging. Teori hedging adalah strategi keamanan yang digunakan oleh negara untuk mengurangi risiko dari berbagai kemungkinan ancaman. Dalam kasus Indonesia, hedging dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan kedua kubu

yang terlibat, yaitu Tiongkok dan AUKUS. Indonesia juga meningkatkan kemampuan militernya untuk memperkuat pertahanannya (Ciorciari dan Haacke, 2019).

Kerja Sama Regional. Selain hedging, Indonesia juga melakukan kerja sama regional untuk meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antar negara di kawasan. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar latihan militer bersama dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok dan Rusia. Indonesia juga berharap ASEAN dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang timbul akibat pembentukan AUKUS. Indonesia menekankan pentingnya kesatuan ASEAN untuk dapat menghadapi berbagai tantangan.

ASEAN dan Tanggapan Indonesia. ASEAN sebagai pemeran penting dalam kawasan Asia Pasifik belum mengeluarkan joint statement tentang pembentukan pakta pertahanan AUKUS oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta keputusan Australia untuk memperkuat armada lautnya menggunakan kapal selam bertenaga nuklir. Tetapi dalam pemaparan mengenai sentralitas ASEAN pasca AUKUS, Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, meyakinkan bahwa ASEAN tetap memiliki solidaritas tinggi meski belum mengeluarkan sikap bersama mengenai AUKUS. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa ASEAN tidak terpecah dan sentralitasnya telah terkompromikan secara masif, hanya saja anggota ASEAN memiliki perhitungan strategi yang berbeda mengenai respon yang diberikan terhadap dinamika AUKUS. Konflik bersenjata juga tidak akan terjadi karena negara-negara ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan konflik bukan melalui kekerasan bersenjata, melainkan melalui dialog yang didasari saling pengertian untuk menghormati kedaulatan tiap negara dan menumbuhkan rasa percaya. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa ASEAN dapat mengelola kegiatan yang mengarah pada perlombaan nuklir di kawasan dengan menerapkan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). Indonesia juga menghimbau negara-negara yang mempunyai senjata nuklir untuk akses protocol traktat SEANWFZ agar dapat mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari

senjata nuklir (Jayanti Mandasari, 2023). Hal ini sejalan dengan visi ASEAN untuk berkontribusi dalam mewujudkan implementasi prinsip piagam PBB untuk menjaga perdamaian dunia dengan membentuk zona bebas senjata nuklir.

Tanggapan Indonesia. Tanggapan Indonesia secara keseluruhan terhadap ancaman kekuatan Tiongkok yang meningkat dan aliansi AUKUS telah menegaskan pada semua pihak untuk mengutamakan perdamaian Kawasan Asia Pasifik. Di saat yang bersamaan Indonesia juga memiliki banyak kerja sama dan hubungan baik pada negara mitra AUKUS dan Tiongkok. Sikap yang Indonesia telah berikan atas terbentuknya AUKUS merupakan cerminan dari politik luar negeri "Bebas Aktif" yang dianut oleh Indonesia. Sikap ini juga merupakan strategi hedging untuk mengurangi resiko dari ancaman dari keadaan diluar kapasitas Indonesia selagi mendapat keuntungan dari peluang yang ada. Disisi lain, karena kawasan ini menjadi percaturan distribusi dari beberapa kekuatan akibat dari peningkatan kapasitas pertahanan Tiongkok dan Amerika yang membentuk aliansi AUKUS, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menyeimbangkannya dengan banyak kekuatan tanpa membahayakan stabilitas regional.

Dalam penelitian ini juga terlihat bahwa jawaban dari tantangan yang dialami Indonesia tidak hanya dituangkan melalui kebijakan tapi juga dari upayanya untuk mengukuhkan prinsip sentralitas ASEAN yang selalu mengutamakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Karena dalam tatanan dunia yang semakin multipolar dan berkurangnya multilateralisme, tidak ada kontradiksi antara memainkan politik kekuasaan dan mempromosikan nilai yang dijadikan acuan. Sebaliknya, prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia dalam mempromosikan perdamaian melalui ASEAN, menunjukkan bahwa tidak meninggalkan prinsip menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan merupakan tanda sebuah kekuatan.

Analisis Dengan Bentuk Kuadran

Pada pembahasan yang menggambarkan sikap Indonesia dalam menanggapi pembentukan AUKUS oleh Amerika dan sekutu, kita dapat

melakukan analisis dengan membaginya ke dalam kuadran berdasarkan dua dimensi utama: sikap terhadap AUKUS (positif/negatif) dan upaya menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok (berimbang/tegas).

Kuadran 1: Mendukung AUKUS dan Berimbang Hubungan (*Positive-Supportive and Balanced*):

1. Meskipun tidak secara eksplisit mendukung AUKUS, Indonesia tidak secara terbuka menentangnya.
2. Indonesia menekankan pentingnya menjaga dialog dan kewajiban nonproliferasi nuklir Australia.
3. Indonesia tetap menjaga hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok, berusaha untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan strategis dari semua pihak.

Kuadran 2: Menentang AUKUS dan Berimbang Hubungan (*Negative-Against and Balanced*):

1. Indonesia menentang pembentukan AUKUS karena khawatir akan meningkatkan ketegangan di kawasan dan menyebabkan perlombaan senjata.
2. Meskipun kritis terhadap AUKUS, Indonesia tetap menjaga hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok, berusaha untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan strategis dari semua pihak.

Kuadran 3: Mendukung AUKUS dan Tegas terhadap Amerika Serikat dan Inggris (*Positive-Supportive and Firm*):

1. Tidak ada indikasi dari materi bahwa Indonesia mendukung AUKUS dan bersikap tegas terhadap Amerika Serikat dan Inggris secara bersamaan.

Kuadran 4: Menentang AUKUS dan Tegas terhadap Amerika Serikat dan Inggris (*Negative-Against and Firm*):

1. Tidak ada indikasi dari materi bahwa Indonesia menentang AUKUS dan bersikap tegas terhadap Amerika Serikat dan Inggris secara bersamaan.

Berdasarkan analisis ini, Indonesia cenderung berada di Kuadran 1, yaitu mendukung AUKUS dengan berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok. Indonesia memilih pendekatan yang lebih moderat dan pragmatis dengan berfokus pada dialog, kewajiban nonproliferasi, dan hubungan ekonomi. Sikap ini mencerminkan prinsip "Bebas Aktif" dalam politik luar negeri Indonesia, yang memungkinkan negara ini untuk menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa secara terbuka mendukung atau menentang salah satunya.

Gambar 1. Bagan Kuadran Analisis Mengenai Tanggapan Indonesia Terhadap AUKUS



Analisis Konsep "Bebas Aktif" Dalam Konteks Sikap Indonesia Terhadap AUKUS:

1. Bebas Aktif Sebagai Panduan Kebijakan Luar Negeri:

Konsep "Bebas Aktif" adalah panduan utama dalam politik luar negeri Indonesia sejak kemerdekaannya. Dalam konteks AUKUS, "Bebas

Aktif" mencerminkan pendekatan yang tidak memihak secara tegas kepada salah satu kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat atau Tiongkok, tetapi berusaha menjalin hubungan dengan keduanya serta sekutu-sekutunya.

2. Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dan Kedaulatan:

"Bebas Aktif" juga mencerminkan upaya Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya. Dalam konteks AUKUS, Indonesia berupaya memastikan bahwa keputusan dan tindakan Australia dalam kemitraan tersebut tidak mengancam kedaulatan dan keamanan Indonesia.

3. Penekanan pada Dialog dan Kewajiban Internasional:

"Bebas Aktif" menekankan pentingnya dialog dalam menyelesaikan perbedaan dan mematuhi kewajiban internasional. Dalam tanggapannya terhadap AUKUS, Indonesia mendorong dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, dan pemenuhan kewajiban nonproliferasi nuklir oleh Australia.

4. Pragmatisme dan Keseimbangan Kekuatan:

Konsep ini mencerminkan pendekatan pragmatis dalam hubungan internasional, yang memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan strategis dari berbagai pihak. Terkait AUKUS, sikap Indonesia mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok, dengan fokus pada keuntungan nasional.

5. Penilaian Risiko dan Manajemen:

"Bebas Aktif" juga mencerminkan penilaian risiko yang matang dalam hubungan internasional. Dalam menghadapi AUKUS, Indonesia tampaknya melakukan manajemen risiko dengan pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif namun tetap berhati-hati terhadap potensi ketegangan.

KESIMPULAN

Dalam menanggapi pembentukan AUKUS di Kawasan Asia Pasifik, Indonesia telah memainkan peran yang bijak dengan berpegang pada prinsip

Bebas Aktif. Prinsip ini, yang telah menjadi panduan politik luar negeri Indonesia sejak kemerdekaannya, mencerminkan pendekatan yang seimbang dan bijaksana terhadap dinamika kompleks di kawasan ini. Konsep "Bebas Aktif" yang menjadi pedoman politik luar negeri Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dalam mengevaluasi sikap Indonesia terhadap pembentukan AUKUS. Dalam kerangka "Bebas Aktif", Indonesia berusaha menjaga keseimbangan dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa tampil terlalu pro atau kontra terhadap kekuatan besar tertentu. Sikap Indonesia mencerminkan pragmatisme, manajemen risiko, penekanan pada dialog, dan pemenuhan kewajiban internasional.

Indonesia, sebagai negara berdaulat dan merdeka, telah menjaga kemerdekaan dan kedaulatannya dengan memastikan bahwa keputusan-keputusan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam AUKUS tidak mengancam keamanan nasional. Ini juga ditekankan dalam memastikan pematuhan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, yang penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sikap Indonesia juga mencerminkan pragmatisme dan manajemen risiko yang matang. Pentingnya "Bebas Aktif" dalam konteks ini adalah memungkinkan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya sambil tetap terbuka terhadap peluang kerja sama ekonomi dan strategis dengan berbagai kekuatan besar. Dalam hal AUKUS, Indonesia tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan dengan Amerika Serikat dan Inggris tetapi juga menjaga hubungan dengan Tiongkok dan ASEAN. Kesimpulan komprehensifnya adalah bahwa "Bebas Aktif" adalah pendekatan yang bijaksana dalam menavigasi dunia multipolar saat ini dan memberikan Indonesia fleksibilitas yang diperlukan untuk mengelola hubungan internasionalnya dengan cermat dan efektif.

Indonesia berupaya menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan ASEAN tanpa terlalu tampil pro atau kontra. Lebih dari itu, Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi dan strategis dari berbagai pihak, sejalan dengan prinsip Bebas Aktif yang memungkinkan negara ini untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Prinsip

ini juga mencerminkan pentingnya dialog sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan dan menjaga stabilitas. Untuk masa depan, Indonesia dapat terus memperkuat prinsip Bebas Aktif dalam menghadapi perubahan dinamika di kawasan. Hal ini mencakup mempertimbangkan implikasi lebih lanjut dari AUKUS, memastikan bahwa kewajiban internasional seperti nonproliferasi nuklir tetap dipatuhi, dan menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan ASEAN. Prinsip Bebas Aktif adalah aset berharga yang memungkinkan Indonesia untuk menjalani peran yang efektif dalam dunia multipolar saat ini, sambil menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkat Ullah, (2021), "Growing Significance of Asia Pacific Region in International Politics", STRAFASIA, https://strafasia.com/_trashed/ diakses pada 19 September 2023
- Ciorciari, J. D & Haacke, J. (2019). *Hedging in international relations: an introduction*. International Relations of the Asia-Pacific 19(3):367–374.
- Diago, Lopez Van Silva. dkk. (2022). Fact Sheet SIPRI: TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURES 2021. https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/fs_2204_milex_2021_0.pdf diakses pada 19 January 2023
- Erin, Sobarini. dkk. (2021), AUKUS Pact in the Perspective of Security Dilemma, *Indonesia Defence University*, 4(12): 3983.
- Evelyn, Goh. (2006). *Understanding 'hedging' in Asia-Pacific Security*. Pacific Forum CSIS, hal 43
- Haryanto, A. (2014). "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 4(2): 17–27.
- Indonesia. (1978). Undang Undang Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata Senjata Nuklir, 2023.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hubungan Luar Negeri Tahun 1999.
- Indonesia. (2016). Presiden Jokowi: Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas ialah Kunci Kemakmuran ASEAN 2016.
- Indonesia. (2019). Kementerian Luar Negeri, Forum Regional ASEAN (ARF). 2023.

- Indonesia. (2022). Presiden Jokowi Dorong ASEAN-RRT Jaga Stabilitas Kawasan. SETNEG. 2022.
- Indonesia Defence. (2023). “Pertama di ASEAN, Indonesia Bakal Mampu Memproduksi Kapal Selam Sendiri”, <https://indonesiadefense.com/pertama-di-asean-indonesia-bakal-mampu-produksi-kapal-selam-sendiri/> diakses 11 Juni 2023.
- J, Garzón. (2017). *Multipolarity and The Future Of Economic Regionalism*. Cambridge University, hal 101-135.
- John D Ciorciari, Jürgen Haacke, Hedging in international relations: an introduction, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 19, Issue 3, September 2019, Pages 367–374, <https://doi.org/10.1093/irap/lcz017>
- Puspen TNI. (2023). Angkatan Laut 36 Negara Meriahkan MNEK 2023 Makassar. 2023.
- Puspen TNI. (2023). Super Garuda Shield 2023 Akan Diikuti Militer 22 Negara. 2023.
- Jayanti Mandasari, (2023), ASEAN Ajak Lima Negara Ciptakan Kawasan Bebas Nuklir, RRI, <https://www.rri.go.id/kalimantan-utara/internasional/290496/asean-ajak-lima-negara-ciptakan-kawasan-bebas-nuklir> diakses pada 1 Agustus 2023
- Kementerian Luar Negeri. (2021). Pernyataan mengenai Kapal Selam Nuklir Australia, 2023.
- Kementerian Luar Negeri. (2023). Menlu Retno: Kawasan Asia Tenggara Harus Tetap Bebas dari Senjata Nuklir, 2023
- Krisyantono, Rachmat. (2014). *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Li Mingjiang. (2021). ASEAN's response to AUKUS: strategic implications realignment in the Indo-Pacific. *China International Strategy Review*. 4: 269-283
- Marriane, Delanova. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik, *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(02), 259 - 285.
- Nindya Annisa & Abbiya Rifqy. (2022). Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia. *Jurnal Politica*. 13(1): 2.
- Novan Iman Santoso. Wartawan Jakarta Post. (2023). Indonesia Attitude's over AUKUS. Wawancara, 12 Juni
- Prayitno, Heru. (2021). AUKUS and The Role of ASEAN Centrality In Managing Regional Security Affairs. *Technium Social Sciences Journal*, 26: 678-688
- Robert, Jervis. (1978). *Cooperation Under the Security Dilemma*. Cambridge University. hal 178

- Rourke, J. T. (1995), *International Politics on The World Stage (5th Ed.)*. Dushkin Pub. Groups/Brown & Benchmarks. Hal 16.
- Tessman B & Wolfe W. (2011). *Great Powers and Strategic Hedging: The Case of Chinese Energy Security Strategy*. *International Studies Review*, 13(2): 214–240.
- Tessman. (2012). Strategic Hedging: The Case of Chinese Energy Security Strategy, *International Studies Review*. 13: 241-240.
- The White House. (2021). Joint Leaders Statement on AUKUS.
- Utami, Saskia. (2022). Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS dan Implementasinya Pada Ketahanan Wilayah Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 28(2): 119-221
- Waltz, Kenneth. (1978). *Theory Of International Politic*, Berkeley: University of California, hal: 196.
- Waltz, Kenneth. (1979). *Theory of International Politics*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. hal 3
- Wijayanti, Anita. (2022). “*Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif*”, *Journal of Government Studies*, 2(2): 77.
- William Choong & Ian Storey. (2021). Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, NonProliferation and Regional Stability. YUSOF ISHAK INSTITUTE. 134: 1-12
- Yanti R, dkk. (2020). Judicial Review of Indonesia's Position as the First Archipelagic State to Implement the Traffic Separation Scheme to Establish Maritime Safety and Security, *International Journal of Law and political*, 14(12): 1176 -1180